

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bagian bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian berdasarkan Peran Pemerintah Desa dalam mendukung Perpustakaan untuk meningkatkan literasi di Desa Wukirsari Imogiri Kabupaten Bantul. Teori yang digunakan oleh Arimbi dan Santosa (2003), dalam Gunena (2013) tentang Peran mencakup 3 (tiga) variabel pokok yaitu Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat sengketa, dan Peran sebagai terapi. Dalam Bab ini dijelaskan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab pendahuluan mengenai peran Pemerintah Desa Wukirsari sebagai aktor yang mempunyai fungsi mengatur pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Wukirsari. Desa Wukirsari yang berada di Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul Yogyakarta mempunyai salah satu fasilitas unggulan dalam pendidikan yaitu Perpustakaan Desa, Pustaka Desa Wukirsari.

Pustaka Desa Wukirsari menjadi Perpustakaan Unggulan karena berhasil menjadi perwakilan Kabupaten Bantul dalam ajang Perpustakaan terbaik yang diikuti oleh perpustakaan-perpustakaan dari seluruh Indonesia. Pustaka Desa Wukirsari mendapatkan Juara 3 secara nasional, acara tersebut diselenggarakan oleh Perpustakaan RI. Tujuan ini tidak hanya semata-mata sebagai ajang unjuk gigi perpustakaan terbaik tetapi hal yang penting adalah sebagai bahan percontohan dalam meningkatkan literasi minat baca

masyarakat yang rendah. Pemerintah menggagas program ini untuk menurunkan angka buta aksara di Indonesia dan sebagai sosialisasi pentingnya program perpustakaan yang ada di Desa.

Untuk lebih detailnya terkait dengan bagaimana peran Pemerintah Desa Wukirsari ini dalam mendukung Pustaka Desa Wukirsari penulis akan menjabarkannya kedalam beberapa poin dalam pembahasan sebagai berikut.

## **1. Peran Sebagai Suatu Kebijakan**

### **a. Kebijakan Yang Tepat Dan Baik Dilaksanakan**

Kebijakan merupakan suatu usaha yang dapat dikatakan banyak memerlukan pertimbangan yang matang dalam merumuskan. Kebijakan sebenarnya menyangkut banyak aspek yang luas dan terinci, karena kebijakan tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam Negara ataupun kehidupan bermasyarakat tetapi juga akan digunakan untuk menanggulangi segala perkembangan di kehidupan masyarakat untuk jangka waktu yang panjang. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparat pemerintah sehingga tercapai kelancaran dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan pemerintah yang dimaksud di penelitian ini adalah setiap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atas nama instansi yang dipimpin dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintahan, guna

mengatasi permasalahan tertentu atau dalam mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan yang baiknya dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat formal. Maka dari itu, Suatu kebijaksanaan pemerintah bersifat luas baik mengenai susbtansi (ekonomi, politik, administrasi Negara, sosial, dsb) maupun strata dalam (kebijaksanaan operational, kebijaksanaan strategis, kebijaksanaan manajerial) dan mempunyai status hukum yang berasal dari (Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, dsb.).

Secara umum peranan pemerintah mempunyai peran dalam melaksanakan kebijaksanaan serta pengawasan dalam pelaksanaan peraturan, tetapi juga dalam perumusan dan penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah karena fungsi pemerintah adalah fungsi politik. Kebijaksanaan Pemerintah dalam membuat keputusan dilakukan dengan bersifat strategis, *policy*, atau ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan isi perundangan-undangan yang berlaku.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2022 Desa Wukirsari yang berguna untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa, belum ada bentuk peraturan tertulis yang menyangkut tentang Peraturan khusus tentang Perpusdes tersebut namun Pemerintah Desa

Wukirsari telah mengeluarkan peraturan tersebut dalam Surat Keputusan Lurah Desa Wukirsari Nomor 11 & 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa. Dasar dari pembentukan SK Lurah Desa Wukirsari nomor 11 Tahun 2013 adalah :

1. menimbang dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat maka perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan.
2. Bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pustaka Desa Wukirsari belum diatur secara komprehensif dalam suatu Peraturan Sendiri.

Sedangkan, Surat Keputusan Lurah Desa Wukirsari Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Pustaka Desa Wukirsari. Dasar dari pertimbangan SK Desa Wukirsari nomor 12 Tahun 2013 adalah :

1. bahwa penyelenggaraan administrasi penerimaan penyimpanan penggunaan dan inventarisasi barang perpustakaan desa diperlukan penangaanan khusus dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.
2. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Lurah Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten

Bantul tentang pengelola barang milik Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

Surat Keputusan Lurah Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Nomor 11-12 Tahun 2013 dalam Pembentukan Perpustakaan Desa Wukirsari memiliki isi keputusan yang sama, yaitu :

Pertama : Mengangkat Petugas Pengelola Pustaka Desa Wukirsari dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini.

Kedua : Tugas pengelola barang milik/dikuasai pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Tugas penerimaan dan Penyimpanan;
- b. Tugas pengeluaran / penyaluran barang;
- c. Tugas inventarisasi berupa laporan dan pencatatan barang milik Perpustakaan Desa Wukirsari.

Terbentuknya Surat Keputusan Lurah yang telah dijelaskan diatas membuktikan adanya komitmen dan ketentuan prosedur yang jelas tentang pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wukirsari. tidak hanya itu saja namun Surat Keputusan Lurah Desa Wukirsari Nomor 11-12 Tahun 2013 tersebut diperkuat oleh Surat

Keputusan Bupati Bantul, nomor 223 Tahun 2018 tentang Pendirian Perpustakaan Desa Wukirsari. Surat Keputusan tersebut juga membuktikan komitmen Bupati Bantul dalam memperkuat kedudukan Perpustakaan Desa dan sesuai dengan salah satu misinya yaitu menciptakan Gerakan Literasi Bantul dan regulasi tersebut diperkuat dalam instruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2017 dalam menumbuhkan minat baca masyarakat di desa dan mengaktifkan kembali Perpustakaan Desa. dengan adanya Surat Keputusan Lurah Desa Wukirsari tentang pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa Wukirsari memiliki otoritas dalam pembuatan regulasi serta peraturan yang jelas dalam membuat keputusan.

Dari wawancara bersama dengan Bapak Ujang Purnomo selaku Ketua Pengurus Pustaka Desa Wukirsari memberikan pernyataan sebagai berikut :

*“Perpusdes Desa Wukirsari memang belum memiliki perdes khusus tetapi Pemerintah Desa Wukirsari sudah membentuk dalam SK Lurah Desa Wukirsari Nomor 11 & 12 Tahun 2013 dalam pembentukan dan pengelolaan Pustaka Desa jadi Pustraka Desa Wukirsari berpedoman pada SK tersebut, tetapi kita masih terus mendorong Pemerintah Desa untuk membuatkan perdes khusus dan masuk dalam RPJMDes.”*

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Desa Wukirsari hingga Tahun 2019 belum mampu mewujudkan dalam pembentukan perdes khusus tentang Pustakan Desa, namun Pustaka Desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan Pustaka Desa sudah berpedoman dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Wukirsari berbentuk Surat

Keputusan Lurah Nomor 11-12 Tahun 2013. Dari Surat Keputusan Lurah ini menjadi dasar hukum yang dimaksudkan untuk menyediakan acuan tentang organisasi dan penyelenggaraan, koleksi buku, administrasi, kegiatan dan layanan, serta sarana dan prasarana yang berlaku pada Perpustakaan Desa.

Dari wawancara bersama pak Agus Tapip selaku Kaur Umum menambahkan pernyataan sebagai berikut :

*“kalau masalah di RPJMDes sendiri saya kurang tepat, saya tahunya ada di RKP dan di APBDes dalam anggaran pengelolaan perpustakaan desa da juga pada tahun 2013 pak lurah sudah mengeluarkan SK tentang pembentukan perpustades nomor 11 dan 12.”*

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Bapak Sutrisno selaku Ketua BPD Pemerintah Desa Wukirsari :

*“memang belum ada perdes khusus yang mengatur tentang Pustaka Desa tetapi didalam baik itu musdes yang termasuk dalam RPJMDes, RKP dan APBDes peran dari BPD sudah maksimal didalam perencanaan terutama penganggaran yang menyangkut Pustaka Desa BPD selalu turut mengikuti.”*

BPD mempunyai peran dalam membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan didalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dalam wawancara tersebut menjelaskan dalam keterlibatan BPD bersama Pemerintah Desa adalah setiap pembuatan RPJMDes melalui musdus dan BPD turut mendampingi musdus tersebut di 16 pedukuhan yang tersebar di Desa

Wukirsari yang selanjutnya dilakukan Musdes (Musyawarah Desa) bersama dengan BPD.

Selanjutnya dapat disimpulkan, dalam pengelolaan dan pengembangan Perpustades Pemerintah Desa Wukirsari berpedoman dalam SK Lurah Desa Wukirsari Nomor 11 & 12 Tahun 2013, pelaksanaan kebijaksanaan tersebut Pemerintah Desa Wukirsari melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, dan kejelasan dalam pembuatan regulasi tentang pembentukan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa Wukirsari dan keterlibatan beberapa pihak memiliki fungsi otoritas sesuai dengan peran masing. Pelaksanaan yang baik akan menghasilkan hasil dan keputusan yang dapat diterima maka dapat dikatakan kebijaksanaan yang tepat tersebut berhasil. Jadi, Kebijaksanaan pemerintah meliputi hampir seluruh segi kehidupan masyarakat dan keputusan tersebut akan menentukan perkembangan di dalam seluruh lapisan masyarakat yang ada di dalamnya.

#### **b. Implementasi Pelaksanaan yang Baik**

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn (dalam Musta'in, 2016) mendefinisikan "implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau



swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari penjelasan mengenai implementasi di atas, bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu program, baik itu di lingkungan pemerintah, masyarakat, organisasi atau sekolah yang hasilnya dapat di lihat dari perbandingan pencapaian target dengan tujuan awal, sehingga dalam implementasi ini sangat dimungkinkan banyak hal yang sifatnya teknis sebagai upaya dari pencapaian tujuan tersebut.

Kebijakan dalam SK lurah Nomor 11 & 12 mengarah kepada salah satu Program Kegiatan Pustaka Desa Wukirsari dalam Studi dan Advokasi Pustaka Desa yang dimana sasaran program dari Perpustades ini ditujukan kepada Pemerintah Desa. Tujuan dari program ini untuk membuktikan sejauh mana peran Pemerintah Desa Wukirsari dalam memperkuat komitmennya pada Perpustakaan Desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Rencana Kegiatan dari Studi dan Advokasi Kebijakan Pustaka Desa meliputi :

- a) Mendorong terbitnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pustaka Desa Wukirsari.
- b) Perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam penyelenggaraan Pustaka Desa.
- c) Pengembangan kerjasama dengan Mitra Jejaring dan stake holders.

Berikut penulis akan menjabarkan implementasi dari hasil program tersebut ke dalam tabel dibawah ini, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Implementasi Program Studi dan Advokasi Kebijakan Pustaka Desa**

<b>IMPLEMENTASI PROGRAM STUDI dan ADVOKASI KEBIJAKAN PUSTAKA DESA</b>				
NO	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	OUTCOME
a)	Mendorong terbitnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pustaka Desa Wukirsari.	Pemerintah Desa	Mempelajari dan sharing tentang penyelenggaraan dan tujuan dari perpustakaan	Terbitnya Peraturan Lurah Desa tentang pendirian Pustaka Desa Wukirsar
b)	Perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam penyelenggaraan Pustaka Desa.	Pemerintah Desa, BPD, dan stake holders	Komitmen untuk membangun Pustaka Desa Wukirsari	Munculnya pendanaan kontinyu yang terdapat dalam APBDesa Wukirsari
c)	Pengembangan kerjasama dengan Mitra Jejaring dan stake holders.	Pemerintah Desa, BPD, dan stake holders desa	Komitmen untuk membangun Pustaka Desa Wukirsari	Terjadinya Mou

*Sumber : Profil Pustaka Desa, 2019*

Di dalam perencanaan kebijakan tertulis di dalam SK tersebut, keterlibatan pemerintah dalam pengembangan Pustaka Desa tetap melalui proses musyawarah tingkat desa dalam penyusunan anggaran dan sebagainya. Untuk RPJMDes sendiri merupakan tanggung jawab dari Kepala Desa, di

RPJMDes Wukirsari tahun 2016-2022 dilakukan pembaharuan karena pergantian Kepala Desa yang baru maka di ganti dengan RPJMDes tahun 2018-2024. Dari tabel diatas menjelaskan bahwa dari hasil kebijakan SK Lurah Nomor 11 & 12 yang menjadi pedoman dan badan hukum tetap dalam pengelolaan

Perpustakaan Desa menghasilkan salah satu program Studi dan Advokasi Kebijakan Pustaka Desa tetapi dari hasil kebijakan tidak terlalu dijelaskan bagaimana koordinasi atau aturan yang mengikat secara hukum. Berjalannya koordinasi antar Pemerintah Desa dan Pengurus Pustaka Desa sudah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya. Selanjutnya dari implementasi program studi dan advokasi kebijakan pustaka desa dilaksanakan telah berhasil menciptakan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat dan literasi budaya. Salah satu kegiatan unggulan tersebut adalah MOU (*Memorandum of Understanding*) kegiatan MOU ini adalah bentuk-bentuk kerjasama antara Pustaka Desa dan paguyuban masyarakat di Desa Wukirsari dan organisasi masyarakat serta masyarakat Desa Wukirsari yang mempunyai surat aturan kerjasama yang jelas dan resmi yang dibentuk oleh Pustaka Desa Wukirsari

Implementasi dari program MOU (*Memorandum of Understanding*) masih berjalan sampai sekarang diantaranya adalah kegiatan Kalen Edukasi Lupatmo, Kalen Edukasi Tnasah Bejo dan Mbahe Kopi. Kegiatan ditempat

tersebut mempunyai spot untuk pojok baca yang dimana Pustaka Desa menyediakan peminjaman buku 50-100 buku untuk pojok-pojok baca dan dirolling setiap 1-2 bulan sekali selain itu Pustaka Desa melakukan pendampingan kegiatan Kelen Edukasi seperti Pemberian 1000 ekor benih ikan nila. Kegiatan MOU (*Memorandum of Understanding*) selanjutnya adalah Klinik Desain Pustaka Desa dengan Istana Penangkarang Burung Wukirsari dan Mbahe Kopi kegiatan ini berbentuk pendampingan kegiatan Branding Logo dan Media Promosi Istana Penangkarang Burung Wukirsari dan Peminjaman buku koleksi buku Perpustakaan desa, pojok baca Wukirsari yang berjumlah 50 buku dan di update minimal setiap 2 bulan sekali. Kegiatan lain dari MOU (*Memorandum of Understanding*) berkaitan dengan peran pemuda Desa Wukirsari yaitu Pustaka Desa Wukirsari dengan Karang Taruna Budi Luhur Wukirsari kegiatan yang dilakukan lebih berfokus pada penyelenggaraan Kegiatan Literasi Budaya Wukirsari dan Penguatan Kelembagaan masing-masing pihak.

**Gambar 3.1**

**Kegiatan di pojok baca Kelen Edukasi Lupatmo dan Tansah Bejo**



*Sumber : Profil Pustaka Desa Wukirsari, 2018*

Berdasarkan keterlibatan Karang Taruna hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama dengan Hendry Anggara selaku Ketua Karang Taruna Budi Luhur Desa Wukirsari :

*“kegiatan yang kami lakukan untuk Pustaka Desa setiap ada kegiatan masyarakat atau acara Karang Taruna ikut membantu langsung, sedangkan dalam penguatan literasi kita terjun langsung untuk menyadarkan masyarakat dalam pemanfaatan perpustakaan desa dan pojok-pojok baca karena kita tau pada era ini segala bentuk bacaan sudah semakin terkikis dengan kemajuan teknologi jadi ya Karang Taruna selalu membantu dan bekerja sama dengan segala kegiatan dan program yang dilakukan oleh Pustaka Desa.”*

Dari hasil wawancara diatas bersama dengan Ketua Karang Taruna Wukirsari menjelaskan keterlibatan kerjasama yang baik dengan Pustaka Desa Wukirsari dan koordinasi antara kedua pihak biasanya melakukan forum dan pertemuan dalam rapat tetapi tidak dijelaskan kapan saja waktu pelaksanaannya, pertemuan koordinasi tersebut membahas pengembangan

pojok-pojok baca dan kegiatan edukasi lainnya yang sudah berjalan dan dari pertemuan tersebut membahas pelaksanaan masing-masing aktor dan membagi tugas bersama walaupun masih ada beberapa pihak atau salah satu *stake holders* yang kurang berpartisipasi.

Penyusunan RPJMDes dan APBDesa, kebijakan yang pertama dilakukan oleh Kepala Desa adalah melakukan musdus dari sini peran BPD adalah mendampingi mudus ini di dapil masing-masing. Selanjutnya hasil musdus dari 16 pedukuhaan yang ada di Desa Wukirsari tersebut dibuat oleh tim 11 yang diketuai oleh Carik Desa merumuskan hasil musdus tersebut menjadi bahan calon RPJMDes yang baru. Setelah musdus dilaksanakan, barulah musdes dilaksanakan oleh BPD

Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Sutrisno selaku ketua BPD Pemerintah Desa Wukirsari sebagai berikut :

*“jadi, RPJMDes ini dijabarkan dalam program-program tahunan namanya Rencana Kerja Pemerintah, lalu di cover dengan dana, seperti ADD, Pendapatan desa, dan BKK. Selanjutnya di kompelasikan ke dalam program tahun 2019 munculah APBDes yang disahkan melalui perdes APBDes. Sehingga peran pemerintah Desa dan BPD khususnya program Pustaka Desa sudah dari perencanaan sampai mengcover pendanaan dan pengawasan.*

Dari wawancara tersebut proses penyusunan perdes sebagai bahan RPJMDes yang dilakukan Pemerintah Desa Wukirsari dari mulai penyusunan musdus hingga musdes mengikutsertakan partisipasi dari elemen masyarakat hingga masuk ke tingkat musdes yang diikuti dari lembaga masyarakat, tokoh

masyarakat, LPMD, dan lainnya. Kegiatan tersebut masih akan memunculkan ide-ide atau buah pikiran dari masyarakat yang disebut dengan sidang komisi. Mulai dari pembahasan tentang pembangunan fisik, kegiatan program pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana, dan salah satunya pemngembangan Pustaka Desa.

Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan Studi dan Advokasi Kebijakan Pustaka Desa selain mendorong Pemerintah dalam pembuatan perdes khusus, Pustaka Desa telah berhasil menciptakan beberapa kegiatan edukasi yang dikenal dengan MOU (*Memorandum of Understanding*) kegiatan ini berbentuk kerjasama dengan beberapa pihak dari elemen masyarakat Wukirsari membentuk program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, penguatan dan komitmen dari program ini diperkuat dalam bentuk surat kerjasama resmi. Sedangkan, Pemerintah Desa Wukirsari bersama dengan BPD melakukan koordinasi dengan baik dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan tupoksi masing-masing Dalam pengembangan dan pengelolaan Pustaka Desa walaupun belum ada perdes khusus tetapi sudah masuk dalam APBDes Pemerintah Desa Wukirsari.

## **2. Peran Sebagai Strategi**

### **a. Dukungan Masyarakat**

Kebijakan dirumuskan guna fokus kepada pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan atau peningkatan untuk

masyarakat. Kebijakan ini akan berjalan secara efektif dan optimal jika mendapat dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat yang diberikan dalam mendukung Pustaka Desa Wukirsari adalah mengikuti program-program yang dibentuk dari Pustaka Desa dan masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Keberhasilan dari Pustaka Desa Wukirsari sebagai Perpudes unggulan yang di miliki oleh Desa Wukirsari adalah berbicara tentang strategi selain dari masyarakatnya yang antusias dengan adanya Perpudes, dan pengurus Pustaka Desa Wukirsari yang mempunyai komitmen penuh dalam pengelolaan Perpudes dan *stake holders* yang menjadi mitra dalam mendukung Pustaka Desa Wukirsari, dalam Pengelolaan dan pengembangan tidak terlepas dari Peran Pemerintah Desa Wukirsari yang turut andil dalam memutuskan dan sebagai lembaga pemerintah utama yang mempunyai fungsi mengatur segala program dan pelayanan publik yang ada di Desa.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh pak Agus Tapip sebagai Kaur Umum di Pemerintah Desa Wukirsari:

*“Perpudes unggulan itu hanya penilaian orang, tetapi pak Lurah saat itu (Alm.Bayu Bintoro) mempunyai inisiatif untuk membuat Perpudes bersama dengan tokoh masyarakat Desa Wukirsari untuk membudidayakan baca buku di perpustakaan desa dan koordinasi dengan dinas instansi dari Kabupaten, Provinsi dan setelah direstui maka didirikanlah Pustaka Desa Wukirsari”*(Wawancara pada tanggal 23 April 2019)



Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa bentuk kebijaksanaan yang tepat dari Peranan Pemerintah yang digagas oleh Kepala Desa Wukirsari memberikan dampak yang baik bagi suatu bentuk pemberdayaan pendidikan melalui perpustakaan desa di Desa Wukirsari. Selain melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, Kepala Desa juga melibatkan komunikasi bersama Karang Taruna yang mempunyai peran sebagai organisasi kepemudaan yang mempunyai fungsi pelayanan dan diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif didalam proses pembangunan Desa salah satunya di Pustaka Desa Wukirsari.

Dukungan masyarakat yang berperan aktif dalam segala bentuk kegiatan di Pustaka Desa Wukirsari membuktikan bahwa kegiatan ini berhasil menarik partisipasi masyarakat desa dalam memberikan dukungan yang positif dengan adanya perpustakaan desa ini. Selain Perpustakaan Desa program unggul lainnya dalam menumbuhkan minat baca masyarakat desa Wukirsari adalah melalui pojok-pojok baca yang disebar disetiap dusun. Pojok-pojok baca yang disebar disetiap dusun di Desa Wukirsari ini memiliki 3 spot tempat yang pertama di Kalen Edukasi Lupatmo, Kalen Edukasi Tansah Bejo dan pojok baca Mbahe Kopi. Pelaksanaan program ini adalah peminjaman koleksi buku dari perpustakaan desa minimal 50-100 buku kemudian di *rolling* setiap 2 bulan sekali, pojok-pojok baca ini bertujuan agar bagi masyarakat yang merasa Pustaka Desa ini jaraknya lumayan jauh dari

rumah dengan adanya pojok-pojok baca tersebut lebih memudahkan masyarakat untuk membaca di spot-spot yang telah disediakan.

**Gambar 3.2**  
**Kegiatan Literasi Budaya Wukirsari**



*Sumber : Pustaka Desa Wukirsari*

Penulis akan menjabarkan keberhasilan dari sosialisasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pustaka Desa Wukirsari yang dimana kegiatan ini selalu mendapat partisipasi aktif oleh warga desa Wukirsari dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Produk Kegiatan Pustaka Desa Wukirsari**

No	Produk Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	Program kegiatan bagi masyarakat	a. Sosialisasi tentang Pustaka Desa dan menumbuhkan minat baca. b. Publikasi media (media sosial,

		<p>majalah dinding, leaflet dan radio Komunitas swara wukirsari 2012-2014).</p> <p>c. Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat bagi individu dan kelompok-kelompok masyarakat.</p> <p>d. Pelatihan pengurangan resiko bencana.</p>
2	Program Kegiatan anak-anak	<p>a. Mendorong dan memotivasi tumbuh dan berkembangnya, semangat dan minat baca anak-anak Usia PAUD Desa Wukirsari.</p> <p>b. Sosialisasi Pustaka Desa Wukirsari</p> <p>c. Story Telling</p> <p>d. Mewujudkan anak-anak yang tanggap Bencana</p> <p>e. Membangun kepedulian anak-anak yatim / piatu dan diffable</p>
3	Advokasi Kebijakan Pustaka Desa	<p>1. Mendorong terbitnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pustaka Desa Wukirsari.</p> <p>2. Perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam penyelenggaraan Pustaka Desa.</p> <p>3. Pengembangan kerjasama dengan Mitra Jejaring dan stake holders.</p>
4	Penyelenggaraan Sirkulasi Pustaka Desa Wukirsari	<p>Desa Wukirsari merupakan desa yang luas dengan penduduk lebih dari 16.000 jiwa, dengan jumlah yang sekian banyak maka Pustaka Desa Wukirsari berusaha untuk melayani sebanyak mungkin masyarakat dengan jam buka dari 09.00 s/d 16.00 WIB, dari hari senin sampai jum'at. Diluar jam tersebut apabila ada kelompok masyarakat atau lembaga pendidikan baik formal/non formal yang hendak mengunjungi Pustaka desa bisa dilayani dengan syarat berkomunikasi terlebih dulu dengan surat ataupun secara lisan.</p>

		Pelayanan Pustaka Desa Wukirsari dilakukan oleh 2 orang pustakawan dan beberapa relawan yang secara bergiliran dengan jumlah minimal 1 orang setiap harinya.
5	Klinik Desain	Kegiatan ini bermaksud untuk mengedukasi masyarakat untuk mengenal seluk beluk dunia Desain Grafis, dari aplikasi Coreldraw, Photosop, Adobe Illustrtaor sampai dengan bagai caranya untuk mendapatkan penghasilan sebagai Freelancer Desainer grafis. Tahun 2017 kami selenggarakan secara marathon setiap malem sabtu setiap minggunya, baru kemudian di tahun kedua kami selenggarakan tetap di malam sabtu tetapi pada minggu pertama dan keempat. Sampai dengan awal tahun 2018 ini Klinik desain sudah mencapai kegiatan yang ke 30.
	Pelatihan dan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana bagi Masyarakat	Adalah kegiatan-Kegiatan training dan sosialisasi tentang Pengurangan Resiko Bencana yang dilaksanakan oleh Pustaka Desa Wukirsari untuk masyarakat desa Wukirsari khususnya Forum Pengurangan Resiko bencana Wukirsari (FPRB), pelatihan pertama PRB telah dilakukan pada bulan Desember tahun 2012.
	<i>Story Telling</i>	Kegiatan <i>Story Telling</i> tersebut dimaksudkan sebagai upaya mendekatkan Pustaka Desa Wukirsari dengan anak didik usia sekolah. Kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan formal maupun nonformal dengan mengundang lembaga tersebut untuk datang ke Pustaka Desa Wukirsari, perkembangan kegiatan ini ternyata mendapat response yang luar

		biasa terbukti dengan permintaan dari beberapa lembaga pendidikan tersebut untuk mengunjungi Pustaka Desa diluar jadwal kegiatan Pustaka Desa sendiri,
	Pengembangan Kebudayaan Jawa	Kegiatan ini berupa pementasan wayang sederhana (thingklung) hanya seorang dalang dan player keyboard dan pameran produk batik tulis beserta proses membatiknya pada saat-saat tertentu serta pelatihan penggunaan bahasa Jawa ”, dalam keseharian maupun dalam Pertemuan Resmi (Pertemuan RT, Lelayu) atau dalam bahasa Jawa disebut ”Wewarah Boso Jowo. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjalin kerjasama POKGIAT LPMD Dusun Manggung yang menyediakan Tenaga Pengajar, sedangkan Pustaka Desa menyediakan ATK, konsumsi dan kebutuhan lain dalam penyelenggaraan pelatihan ini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap malam minggu dengan peserta wajib dari perwakilan RT se-Dusun Manggung dan peserta lain dari wilayah Desa Wukirsari dan sekitarnya. Sayangnya kegiatan ini hanya berlaku dari November 2012 sampai maret 2015.

*Di olah oleh penulis,2019*

Produk-produk kegiatan yang masih berjalan sampai saat ini merupakan bentuk dukungan dan partisipasi dari masyarakat, pernyataan tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Ujang selaku Ketua Pengurus Pustaka Desa Wukirsari :

*“Insyallah mendukung, karena ada testimoni-testimoni yang kita buat dalam rangka pembuatan profil pustaka desa, karena kegiatan yang kita lakukan juga berbeda-beda. Untuk kegiatan anak-anak yang datang juga anak-anak, sedangkan kegiatan untuk orang dewasa ya mereka juga antusias mengikuti.”*

Sedangkan jika dilihat, sejauh mana dukungan peran pemerintah desa dalam mendukung perpustakaan Bapak Ujang selaku ketua pengurus pustaka desa menegaskan berkaitan dengan perdes khusus tentang pustaka desa bahwa aslinya perdes tersebut seharusnya masuk di RPJMDes.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ujang selaku Ketua Pustaka Desa Wukirsari yang memperkuat pernyataan tersebut :

*“sejak berdirinya Pusta Desa ini kita dari pengurus juga maunya ada perdes khusus yang mengatur tentang perpustakaan desa, tetapi memang belum ada. Tetapi kaitannya dengan pendanaan pustaka desa wukirsari sudah masuk di APBDes Wukirsari.”*

Dalam wawancara tersebut menjelaskan, perdes khusus yang mengatur tentang Pustaka Desa Wukirsari memang belum masuk ke dalam RPJMDes Desa tetapi dari pengurus pustaka desa sendiri menjelaskan selain pengelolaan dana untuk pustaka desa dibentuk oleh Pemerintah Desa, dari pengurus pustaka desa sendiri mengikuti SK Lurah nomor 12-13 yang mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan perpustakaan desa.

Selain peraturan tersebut sudah tertulis di dalam SK Lurah nomor 11-12 peran dari Pemerintah Desa untuk pustaka desa bersifat dominan, dimulai tahun 2014 Pemerintah Desa mulai mempercayakan Pustaka Desa untuk

mandiri, mitra pertama dari pustaka desa dibantu oleh Medco Foundation. Selama 2 tahun Medco Foundation yang mengawal pengelolaan Pustaka Desa. Tetapi ditahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya pengelolaan dan pengembangan Pustaka Desa Wukirsari kembali lagi berada dibawah pengawasan Pemerintah Desa Wukirsari.

Dukungan masyarakat dikatakan berhasil menurut pendapat mbak Oktin selaku dari pihak Medco Foundation sebagai berikut :

*“kita bisa melihat apakah mereka sudah memanfaatkan perpustakaan dengan baik, apakah harapan mereka untuk perpustakaan, poin-poin tersebut merupakan hal penting yang harus kita telaah dan apakah perpustakaan ini sudah membantu literasi masyarakatnya, membantu perekonomian, dan pemberdayaan masyarakatnya jika belum kita evaluasi bersama dengan pemerintah setempat.”*

Pelaksanaan program jika ingin terlaksana dengan efektif dan bertahan dalam jangka waktu yang lama memang harus disertai dengan komitmen, jika tidak produk-produk kegiatan yang sudah diciptakan akan berjalan dengan pasif dan tidak sesuai dengan rencana awal. Maka pemberdayaan masyarakat juga dikatakan tidak berhasil karena dukungan masyarakatnya juga tidak ada.

#### **b. Kredibilitas dalam Mengambil Keputusan**

Pemerintah Desa disini menjadi aktor utama dalam mengambil dan memutuskan sebuah keputusan. Kredibilitas yang baik dapat dilihat dari integritas pemimpin yang tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakatnya dalam setiap mengambil keputusan yang berani

dan bijak. Pemerintah Desa Wukirsari memang belum dapat mewujudkan terbentuknya perdes khusus untuk pustaka desa tetapi dalam pengembangan dan pengelolaan Pustaka Desa masuk kedalam RKP dan APBDes yang tercantum secara resmi. Dalam kebijaksanaan yang diputuskan oleh Desa Wukirsari walaupun belum adanya perdes khusus yang mengatur tentang Pustaka Desa tetapi dari peran Pemerintah Desa bersama dengan BPD telah membuat kebijakan berupa program-program yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

Upaya pengembangan Pustaka Desa bukanlah suatu usaha yang langsung jadi tetapi melalui proses yang panjang yang melibatkan pikiran yang inovatif, kreatif serta mengatur strategi yang matang sampai Pustaka Desa ini menjadi Perpustakaan Desa terbaik. Untuk mencapai strategi tersebut tercapai dari Lurah Desa dan Pemerintah Desa Wukirsari membuktikan sejauh mana kredibilitas dalam mengambil keputusan untuk menciptakan upaya pengembangan Pustaka Desa ini tetap berjalan sampai sekarang. Berikut bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Lurah Desa Wukirsari untuk pengembangan Perpustades meliputi :

- 1) Mensosialisasikan kepada warga desa tentang manfaat dan jasa dengan adanya Perpustakaan Desa
- 2) Mendekatkan buku dan membudidayakan minat baca kepada warga Desa Wukirsari dan sekitarnya



- 3) Menyediakan Perpustakaan sebagai pusat informasi, komunikasi dan Ilmu Pengetahuan
- 4) Menyediakan tempat Perpustakaan Desa yang nyaman dengan menyediakan kegiatan-kegiatan hiburan yang sehat dan mendidik
- 5) Selalu berusaha kooperatif dan komunikatif dengan Pengurus Pustaka Desa dan *stake holders* mengenai segala kebutuhan Perpustakaan desa.

Bentuk implementasi Dari Pemerintah Desa Wukirsari tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Agus Tapip selaku Kaur Umum sebagai berikut :

*“walaupun belum ada kebijakan yang tertulis saat itu, tetapi Pak lurah menghimbau kepada lembaga-lembaga desa agar kegiatan-kegiatan lembaga desa tersebut dilaksanakan di pustaka desa semacam pertemuan kader, pertemuan RPRB, pertemuan Karang Taruna, dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya. Harapannya supaya masyarakat tahu disini ada Perpustakaan Desa.”*

Dari penjelasan wawancara tersebut juga dijelaskan dari pemerintah desa sendiri dalam melakukan pertemuan-pertemuan antara lembaga desa, dari elemen masyarakat Desa Wukirsari turut diikutsertakan, karena di Desa Wukirsari memiliki banyak organisasi masyarakat seperti dari LPMD, Linmas, RB, Karang Taruna, PKK, dsb. Jadi, jika ada kegiatan semacam rapat maka ditempatkan di Pustaka Desa. Selain itu dari Lurah Desa sendiri selalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa setiap pertemuan atau musyawarah yang berkaitan dengan kegiatan dimasyarakat dilaksanakan saja dilingkungan Perpustakaan Desa dengan begitu masyarakat merasa dekat

dengan perpustakaan dan buku bacaan. Serta melakukan pendampingan dan tanggung jawab dalam pengembangan Perpustakaan.

Peran BPD selain membuat Undang-Undang atau perdes desa dalam perannya untuk pengembangan Perpustakaan Desa adalah selalu mengawasi Alokasi Dana Desa bagi pengembangan dan pengelolaan Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wukirsari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pengelolaan dan Pengembangan Pustaka Desa mendapat bantuan alokasi dari Pemerintah Desa sebesar Rp.17.400.000,00 dana sebesar ini tidak hanya untuk program berbentuk fisik saja tetapi digunakan dan dimanfaatkan juga untuk membangun Pustaka Desa Lengkap dengan operasionalnya.

Penganggaran secara rutin baru dilakukan mulai awal berdiri tahun 2013, namun alokasi anggaran untuk perpustakaan tidak tetap. Besarnya anggaran tersebut adalah Rp. 3.000.000,- (Tahun 2013-2014) dan Sekitar Rp. 17.000.000,- (Tahun 2015-2018) dari ADD ( Alokasi Dana Desa) untuk perpustakaan yang dialokasikan untuk pengembangan koleksi 30%, penyelenggaraan jasa/layanan perpustakaan 50%, dan pengeluaran lainnya 20%. Sumber anggaran lainnya hasil kerjasama dengan Medco Foundation, BPAD DIY dan hasil usaha mandiri.

Dari wawancara bersama Bapak Sutrisno Ketua BPD Pemerintah Desa Wukirsari sebagai berikut :

*“memang benar, Pustaka Desa sudah masuk dalam alokasi dana dan itu digunakan untuk segala kebutuhan pengelolaan yang ada di perpustakaan termasuk memberikan dana honorum bagi semua pengurus perpustakaan disini fungsi BPD adalah mengawasi dan selalu berusaha menciptakan transparansi agar masyarakat tau ini loh dana untuk perpustakaan sebesar ini, ya begitu.”*

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa BPD mempunyai peran strategis dalam hal pengawasan sumber dana. tetapi dalam pembuatan perdes khusus BPD belum mampu mewujudkan dalam program studi dan advokasi Pustaka Desa hal ini disebabkan karena pergantian Lurah di Desa Wukirsari sehingga Desa melakukan evaluasi dalam pembuatan RPJMDes dan lebih fokus dalam merubah perdes-perdes yang menjadi prioritas. Tetapi dalam waktu dekat guna menyempurnakan SK Lurah dalam pengembangan Pustaka Desa perdes khusus tersebut akan segera dibentuk hal tersebut juga menjadi salah satu komitmen dari BPD agar bentuk rencana dan program Pustaka Desa dapat tercapai sesuai tujuan.

Selanjutnya, pengambil keputusan yang ketiga adalah dari Peran Ketua Pengurus Pustaa Desa bagaimana strategi dalam mempertahankan kredibilitas perannya sebagai pemimpin Perpustakaan Desa yang bertujuan mewujudkan Pustaka Desa agar lebih berkembang dan selalu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya. Selain itu, Ketua Pengurus Pustaka Desa bertanggung jawab atas segala kegiatan, menyusun konsep perencanaan, mengelola administrasi perpustakaan, mengevaluasi tahunan dan melaporkan kepada Pemerintah Desa.

Bapak Ujang Purnomo sebagai ketua Pengurus Pustaka Desa memberikan pernyataan sebagai berikut :

*“sebagai Ketua Perpustakaan saya selalu mencari cara dan inovasi yang baru dari rangkaian kegiatan dan program untuk Pustaka Desa sebagai langkah menarik masyarakat agar selalu dekat dengan Perpustakaan, kegiatan-kegiatan tersebut saya samakan seperti pemberdayaan masyarakat agar kegiatan ini bersifat umum jadi tidak hanya diikuti oleh anak-anak saja tetapi orang tua juga. Para pengurus perpustakaan juga saling membantu agar kegiatan ini tetap berjalan sampai sekarang, contoh seperti dariyang awalnya hobi design akhirnya membawa nilai ekonomi karena hasil design itu bisa kita jual, dan banyak lagi semua kegiatan kita ada dalam laporan tahunan dan masyarakat juga bisa mengaksesnya.”*

Dari wawancara dengan Bapak Ujang selaku Ketua Pengurus Pustaka Desa beliau menambahkan inovasi yang beliau manfaatkan dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini adalah pemanfaatan sosial media sangat penting, maka dari itu agar masyarakat dapat melihat apa saja kegiatan yang dilakukan di Pustaka Desa masyarakat dapat melihat melalui fanpage *facebook* dan *Instagram* untuk melihat postingan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pustaka Desa.

Upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengurus Pustaka Desa Wukirsari dalam mengembangkan Pustaka Desa agar tetap berkembang menjadi lebih baik meliputi :

- 1) Menyusun konsep perencanaan baik program atau kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif.
- 2) Mengembangkan program MOU (*Memorandum of Uderstanding*) agar tetap berjalan.

- 3) Bertanggung jawab mengelola administrasi perpustakaan.
- 4) Melakukan *stock opname* secara berkala terhadap koleksi buku di Pustaka Desa dan pojok-pojok baca di setiap dusun di Desa Wukirsari.
- 5) Pemanfaatan Sosial Media dan ikut menyebarkan konten-konten positif.

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa tokoh pengambilan keputusan ada tiga peran pokok yang berjalan yaitu Pemerintah Desa, BPD dan Ketua Pengurus Pustaka Desa. Ketiga peran tersebut mempunyai kebijakan dan kewenangan masing-masing dalam kredibilitas peran tersebut untuk mengatur dan mengembangkan Perpustakaan Desa namun tetap pada satu tujuan yaitu Perencanaan yang matang dan pelibatan penyusunan program pembangunan akan menghasilkan keputusan yang tepat bagi kemajuan di Desa sehingga perencanaan program Pembangunan Desa akan tercapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

### **3. Peran Sebagai Alat Komunikasi**

#### **a. Transparansi Pemerintah Kepada Masyarakat**

Transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan, dan juga pertanggungjawaban dalam laporan kerja ataupun alokasi dana desa (ADD). Seperti yang diungkapkan Mustopa Widjaja (2014 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga

dapat diketahui oleh masyarakat. Dari transparansi yang jelas maka akan terciptanya akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi di Pemerintah Desa bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut dalam mengambil keputusan dan menyampaikan buah pikiran dari masyarakat, misalnya saat melakukan musdus dan musdes. Selain itu transparansi dalam lingkup Pemerintah Desa dengan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dalam pengambilan keputusan bersama.

Di Desa Wukirsari sendiri terdiri dari beberapa lembaga masyarakat dan organisasi masyarakat, seperti LPMD, Linmas, RPRB, Karang Taruna, PKK, Guru Paud. Pemerintah Desa Wukirsari menegaskan dalam hal transparansi masyarakat jika pemerintah desamenyelenggarakan rapat yang berkaitan dengan masyarakat, masyarakat desa wukirsari diikutsertakan dalam rapat tersebut dan di berikan kesempatan dalam menyampaikan ide atau buah pikiran mereka di dalam rapat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Agus Tapip selaku Kaur Umum dalam wawancara sebagai berikut :

*“Iya banyak, masyarakat banyak yang respon. Masyarakat ikut dalam pertemuan kemudian ikut usul, katakanlah jika ada kegiatan dengan hubungan perpustakaan desa juga menyumbang dana walaupun sedikit, ada yang menyumbang buku, ada yang menyumbang kesenian kalo ada kegiatan di pustaka desa. Ada juga kegiatan anak muda yang mempunyai inisiatif pengelolaan daur ulang sampah dan klinik*

*design yang mempunyai nilai ekonomi. Awalnya kegiatan seperti itu lalu menjadi ramai.”*

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Tapip selaku Kaur Umum tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wukirsari yang dikhususkan dalam pengelolaan dan pengembangan Pustaka Desa Wukirsari sebagai berikut :

*“ada anggaran sedikit walaupun pertama itu 17 juta, yang kedua itu hampir 24 Juta terus ada alokasi dana saat itu untuk honor pengurus pustaka desa 2 orang itu Rp.300.000/bulan mulai 2016 terus saat ini mencapai Rp.600.000/bulan. Untuk pengelolaan perpustakaan sendiri sampai saat ini masih dianggarkan di ADD.”*

Berikut adalah tabel dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikhususkan untuk pengelolaan Perpustakaan Desa di Desa Wukirsari Tahun Anggaran 2019:

**Tabel 3.3**  
**Rencanan Anggaran Biaya (RAB) Belanja Operasional Pustaka Desa**  
**Anggaran Tahun 2019**

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)						
PEMERINTAH DESA WUKIRSARI KECAMATAN IMOGIRI						
TAHUN ANGGARAN 2019						
<b>1.01.04</b>	<b><i>18 Belanja Operasional Pustaka Desa</i></b>					
<b>5.2.1</b>	<b><i>Belanja Barang Perlengkapan</i></b> Belanja				<b>17.440.000,00</b>	
5.2.1.01.	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				3.240.000,00	
	1. Kertas HVS	ADD	10 rim	50.000,00	500.000,00	

	2. Tinta Printer	ADD	5 botol	100.000,00	500.000,00
	3. Cartrid Printer	ADD	4 pcs	300.000,00	1.200.000,00
	4. Buku Tulis	ADD	10 bh	20.000,00	200.000,00
	5. Bolpoint	ADD	4 dus	50.000,00	200.000,00
	6. Staples	ADD	4 bh	25.000,00	100.000,00
	7. Isi Staples	ADD	4 dus	10.000,00	40.000,00
	8. Lem Kertas	ADD	10 bh	10.000,00	100.000,00
	9. Kertas Plano	ADD	20 bh	5.000,00	100.000,00
	10. Dekorasi Spanduk	ADD	I Ls	300.000,00	300.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				8.500.000,00
5.2.1.06.	1. Belanja Komputer dan printer	ADD	1 unit	8.500.000,00	8.500.000,00
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				5.700.000,00
	2. Konsumsi Rakor Pustaka Desa	ADD	100 dus	28.500,00	2.850.000,00
	3. Konsumsi Sos. Pustaka Desa	ADD	100 dus	28.500,00	2.850.000,00
<b>5.2.5</b>	<b><i>Belanja Operasional Perkantoran</i></b>				6.700.000,00
<b>5.2.5.01.</b>	Belanja Jasa Langganan Listrik				2.500.000,00
	1. Belanja Listrik	ADD	I Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet				4.200.000,00
	1. Belanja Internet	ADD	12 bln	350.000,00	4.200.000,00
<b>5.2.6.</b>	<b><i>Belanja Pemeliharaan</i></b>				8.000.000,00
<b>5.2.6.03.</b>	Belanja Pemeliharaan Peralatan				3.000.000,00
	1. Service Komputer dan Printer	ADD	1 unit	500.000,00	500.000,00
	2. Service Pompa Air	ADD	1 unit	500.000,00	500.000,00
	3. Service Laptop	ADD	1 unit	1.000.000,00	1.000.000,00
	4. Service Proyektor/LCD	ADD	1 unit	1.000.000,00	1.000.000,00



5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan				5.000.000,00
	1. Perawatan Gedung Pustaka	ADD	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>1.01.04</b>	<b><u>Belanja Honorium Lainnya</u></b>				
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Jasa Honorium</b>				
5.2.2.90.	Belanja Jasa honorium staf kontrak/honor				
	1. Honor Jaga Malam Kantor Desa	ADD	24 ob	500.000,00	12.000.000,00
	2. Honor Pustaka Desa	ADD	24 ob	600.000,00	14.400.000,00

**Sumber: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Wukirsari Imogiri Tahun Anggaran 2019**

Berdasarkan transkrip Rencana Anggaran Biaya Tahun 2019 dalam pengelolaan Pustaka Desa, Pemerintah Desa Wukirsari mengeluarkan dana sebesar Rp.17.4000.00, besaran anggaran ini digunakan sebagai pengelolaan operasional, seperti biaya perlengkapan fisik, perlengkapan alat rumah tangga dan kebersihan, barang konsumsi, Pemeliharaan peralatan, pemeliharaan bangunan serta sebagai jasa honorium penjaga perpustakaan. Bentuk transparansi dari segala kegiatan ataupun Alokasi Dana Desa sebisa mungkin Pemerintah Desa terbuka kepada masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Sutrisno selaku ketua BPD sebagai berikut :

*“iya harus ,saya menjadi ketua BPD sudah 2 periode. saya sebagai ketua BPD selalu meminta kepada Lurah, pertama kita punya SID atau web, informasi-informasi penting apapun harus masuk ke web. Kedua, APBDes apakah semua warga masyarakat bisa membaca laporan ADD, karena itu wajib dibikin pemaparan anggaran, disamping itu buku APBDes itu saya minta copy bahkan ketua RT harus semua punya karena kita punya 101 RT dan semua harus*

*pegang APBDes jadi APBDes tersebut bisa disemak oleh semua masyarakat.”*

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa ada komitmen kuat yang dibangun oleh peran dari BPD dalam hal transparansi dana. Pemerintah sendiri mempunyai tugas dalam menjelaskan dan melampirkan segala hasil program ataupun penganggaran dana kepada masyarakat karena aspek transparansi dalam menciptakan “*trust*” juga digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan informasi atau segala masukan dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh pemikiran bahwa pemerintah memang dirancang sebagai pelayan masyarakat, sehingga hasil prefensi berupa masukan tersebut adalah bernilai guna dalam mewujudkan *good governance*.

Guna melihat sudut pandang pemerintah tersebut bekerja dengan baik dalam hal transparansi, penulis tidak hanya melihat dari tolak ukur pemerintah saja tetapi juga melihat dari sudut pandang masyarakatnya. Karena pemerintah merupakan abdi masyarakat yang mempunyai kewajiban dalam menciptakan dan membangun pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya, sebab pelayanan yang baik dan tatanan birokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan akan menciptakan keputusan yang responsif dan responsible sehingga *good governance* dalam Pemerintah Desa akan terwujud.

Peran di fungsikan sebagai suatu cara yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan dalam lingkup Pemerintahan melalui usaha pencapaian atau konsesus dari pendapat-pendapat seperti melakukan bertukar pikiran dan pandangan sehingga dapat meningkatkan toleransi ataupun pengertian sehingga dapat mengurangi rasa kerancuan ataupun tanda-tanda konflik itu sendiri. Peran Pemerintah juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pencegahan dini konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan dan kekuatan militer, peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik, dan monitoring dan evaluasi konflik. Tetapi, tentu dalam penanganan dan peredaman konflik tersebut peran Pemerintah harus dapat merangkul berbagai kalangan di setiap lapisan masyarakat.

Di setiap perencanaan dalam Pembangunan Desa pasti akan muncul permasalahan internal maupun eksternal, maka dari situ peran aparatur Pemerintah wajib melakukan pendampingan dan monitoring dari jalannya program ataupun perencanaan Pembangunan Desa demi menanggulangi gejala konflik yang akan timbul didalam masyarakat. Hendry Anggara selaku Ketua Karang Taruna Budi Luhur Desa Wukirsari menyampaikan pendapatnya terkait penyerapan aspirasi sebagai warga Desa Wukirsari

sebagai rangkaian kerjasama dalam pengembangan Perpustakaan Desa, mengutarakan pendapatnya sebagai berikut:

*“dalam transparansi dana desa untuk pengelolaan perpustakaan bisa kita akses dan ada draftnya juga bisa kita liat di RPJMDaes, dan setau kita ya hanya dari situ tapi saat kita Tanya juga pasti dijawab kok maksudnya dana ini tuh berapa-berapa. Sedangkan untuk program-program dari pemerintah untuk Perpustakaan kita tidak tahu, karena seperti kelen edukasi itu sendiri malah berasal dari inisiatif masyarakat sendiri terutama peran tokoh anak mudanya dan juga Karang Taruna pertama yang menginisiasi adanya Pojok-Pojok baca tersebut saya dan Mas Ridho beliau Ketua Karang Taruna unit Cakra Karta.”*

Dari pernyataan berikut dapat diketahui beberapa program unggulan yang ada di Pustaka Desa sendiri berasal dari inisiatif masyarakatnya sendiri terutama peran Karang Taruna Desa Wukirsari, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ridho Ustadin selaku tokoh paguyuban di Desa Wukirsari sebagai berikut:

*“dalam program pengembangan perpustakaan desa sejauh ini peran pemerintah hanya melakukan peran monitoring, controlling dan pengarahannya saja namun untuk aksi dan implementasi langsung dilakukan oleh masyarakat dan dibantu Karang Taruna terutama pengelolaan pojok-pojok baca di setiap dusun yang ada di Wukirsari.”*

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Peran Pemerintah Desa Wukirsari hanya sebatas memfasilitasi segala kegiatan dan program yang dibuat oleh pengurus pustaka desa, dan Karang Taruna hal ini bertujuan agar Karang Taruna sendiri tahu bagaimana keinginan sebenarnya dari masyarakat yang dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Seperti di ungkapkan oleh Hendry Anggara selaku Ketua Karang Taruna Desa

Wukirsari sebagai berikut:

*“pengembangan perpustakaan desa pada periode saya yang sekarang Karang Taruna lebih memfokuskan perpustakaan ya dari melalui pojok-pojok baca itu, jadi aslinya perpustakaan ini kan milik Pemerintah jadi kita sebar menjadi pojok-pojok baca jadi saya pikir itu bukan untuk menunjang perpustakaan itu sendiri tetapi itu adalah jalan untuk meningkatkan minat baca sehingga perpustakaan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di setiap dusun yang ada di Wukirsari karena Wukirsari ini luas.”*

Dari hasil wawancara tersebut bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator dan juga pengawas dari perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya terutama melalui Karang Taruna Budi Luhur Desa Wukirsari yang mempunyai peran besar sebagai inisiatif pencetus pojok-pojok baca di Desa Wukirsari memiliki permasalahan seperti kurangnya koordinasi dan pelibatan di beberapa kegiatan musyawarah lembaga kemasyarakatan Desa maka dari itu Peran Pemerintah harus lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik demi menjalin kerjasama yang baik dengan Karang Taruna Budi Luhur Desa Wukirsari agar organisasi peran anak muda ini termotivasi dengan Peran Pemerintah Desa yang selalu siap mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat Desa Wukirsari.

Dalam pernyataan-pernyataan sebelumnya yang disampaikan oleh pemerintah desa dalam segala kegiatan atau pertemuan yang dilakukan oleh

pemerintah selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat yang ada di Desa Wukirsari, salah satunya adalah Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna sebagai organisasi wadah kepemudaan, bertumpu pada landasan hukumnya dalam Permensos RI No.77/HUK/2010 tentang Pedoman dasar Karang Taruna. Selain itu Karang Taruna berperan sebagai agen pembaharuan dan pembangunan. Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang mempunyai fungsi pelayanan dan diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembangunan di Desa.

Karang Taruna Desa Wukirsari terdiri dari Karang Taruna unit dusun dan Karang Taruna perwakilan dari setiap dusun-dusun yang ada di Desa Wukirsari. Keterlibatan Karang Taruna di Desa Wukirsari dalam pengembangan Pustaka Desa juga terlibat langsung dalam pertemuan-pertemuan seperti saat ada kegiatan atau acara-acara Desa yang ada di Perpustakaan dan membantu dalam rangkaian kegiatan yang ada di Desa Wukirsari. Dari masalah kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Karang Taruna Pemerintah Desa sebaiknya terus mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan Karang Taruna terlebih dalam pengembangan Pustaka Desa dan Pojok-Pojok Baca di setiap dusun.

Namun yang menjadi persoalan disini bagaimana menilai sebuah transparansi tersebut sudah berjalan dengan baik dari sudut masyarakat di Desa Wukirsari sendiri. Pustaka Desa sebagai Perpustakaan yang berhasil

mengembangkan perpustakaan Desanya dengan baik tetapi belum mempunyai peraturan tertulis tentang perdes khusus di RPJMDes Desa Wukirsari namun sudah masuk dalam APBDes Desa Wukirsari. Jika kita melihat kebelakang didalam Profil Pustaka Desa dalam hal Bidang Kegiatan nomor 3 dalam sub.kegiatan advokasi kebijakan pustaka desa sebagai berikut:

### **Advokasi Kebijakan Pustaka Desa**

1. Mendorong terbitnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pustaka Desa Wukirsari.
2. Perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam penyelenggaraan Pustaka Desa.
3. Pengembangan kerjasama dengan Mitra Jejaring dan *stake holders*.

Salah satu bidang kegiatan dari rencana kegiatan tersebut adalah mendorong terbitnya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pustaka Desa Wukirsari. Kegiatan ini juga bertujuan mendorong komitmen politis antara Pemerintah Desa Wukirsari dengan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan Desa, karena SK Lurah nomor 13-14 yang dimiliki Pustaa Desa saja belum terlalu kuat dalam mengatur kebijakan yang sudah masuk ke dalam APBDes Wukirsari. Komitmen pelayanan kepada masyarakat yang dibangun Pemerintah Desa Wukirsari untuk Perpustakaan Desa ini apakah sudah sejalan dengan keinginan masyarakatnya dengan ini pernyataan dari Bapak Ujang Purnomo selaku Ketua Pustaka Desa Wukirsari sebagai berikut:

*“dalam penyusunan perdes yang menginisiasi harusnya dari pihak BPD, nah sebenarnya urusan dengan penyusunan perdes itu kan ranah kerjanya mereka nah kebetulan banyak perdes yang harus dilahirkan oleh BPD dan Pemerintah Desa yang lebih wajib dan itu juga belum selesai dan dalam 5 tahun ini mereka belum selesai dalam menyelesaikan perdes yang wajib-wajib tersebut. Jadi, perdes yang untuk pustaka desa ini masih belum terlaksana tetapi suatu saat pasti terbentuk segera.”*

Dari wawancara tersebut dapat terlihat komunikasi dan koordinasi Pemerintah Desa dengan Pengurus Perpustakaan Desa kurang optimal dalam penyusunan Perdes khusus untuk perpustakaan tetapi permasalahan tersebut terimbangi dengan komitmen Pemerintah Desa Wukirsari yang telah menyusun APBDes untuk pengelolaan Perpustakaan Desa. Di dalam struktur pemerintahan terutama BPD pasti mempunyai seksi-seksi dan perwakilan disetiap dusun, seharusnya masalah tersebut dapat teratasi dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik jika perdes tersebut ingin dapat segera terlaksana tetapi kembali lagi bahwa tugas dan kewenangan di setiap Desa juga berbeda.

Guna mengatasi masalah yang ada di Desa melalui Ketua BPD Bapak Sutrisno membuka program *Public-Hearing* yang dikhususkan kepada warga Desa Wukirsari dalam menyampaikan keluhan atau ingin berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang desa, *Public-Hearing* ini bertujuan mendekatkan warga masyarakat dengan Pemerintah Desa bahwa Pemerintah Desa ingin menunjukkan pelayanan yang baik bagi warga masyarakat Desa Wukirsari, dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan



desa sehingga dituntut kemampuannya untuk dapat menggali berbagai persoalan, keinginan dan harapan masyarakat, sebab partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk dapat mengimplementasikan berbagai rencana program sehingga tujuan dari Pembangunan Desa dapat terwujud.

#### **b. Pelayanan Kepada Masyarakat**

Tugas utama aparaturnya pemerintah tidak hanya mengurus persoalan administrasi dan membuat aturan –aturan bagi masyarakat saja tetapi yang utama adalah tentang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di desa setempat. Memang sudah tepat pemerintah desa melakukan kegiatan musdes, musdes dan musrenbang bersama dengan masyarakat tetapi pemerintah juga harus mempunyai waktu untuk terjun langsung ke lapangan guna mengetahui kondisi riil dari masyarakatnya. Cara ini dikatakan sangat efektif dilakukan dalam menumbuhkan pelayanan yang baik dan menumbuhkan motivasi warga desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa. Cara terjun langsung ke lapangan ini orang menyebutnya dengan *blusukan* yang dimana cara ini pemerintah desa bisa berinteraksi langsung dengan warga desanya, karena masyarakat merasa diperhatikan maka cara ini dengan mudah mereka dapat termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Pengelolaan perpustades di Desa Wukirsari sendiri Pemerintah Desa Wukirsari mempunyai komitmen untuk selalu mengedepankan pelayanan yang baik bagi pengembangan Pustaka Desa Wukirsari, dari mulai pengelolaan tempat dan koleksi buku-buku yang dimiliki hingga petugas khusus yang membantu mengelola Pustaka Desa ini tetap berjalan dengan baik sesuai tujuan yaitu meningkatkan minat baca masyarakat desa melalui Perpustakaan Desa. Dalam upaya pelayanan perpustades sendiri untuk meningkatkan literasi di Pustaka Desa semua juga melalui prosedur dan proses apalagi dalam mengukur keberhasilan literasi yang di capai.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Sutrisno selaku Ketua BPD Pemerintah Desa Wukirsari sebagai berikut:

*“saya belum bisa mengukur keberhasilan literasi, sebenarnya istilah literasi itu kan luas tidak hanya soal baca saja, namun dalam keberhasilan perpustakaan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bahwa disitu ada pengunjung, ada buku, ada proses d isitu ada impact yang baik, maka itu saya kira sudah sangat bagus dalam melihat keberhasilan dengan adanya perpustakaan desa ini.”*

Jadi, dalam wawancara tersebut Bapak Sutrisno menjelaskan bahwa dalam mengukur sejauh mana keberhasilan dari perpustakaan desa tersebut berhasil jika barang tersebut dapat bermanfaat, dapat dikelola, dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya bagi salah satu pelayanan publik yang ada di desa dan dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Desa Wukirsari dan masyarakat luar. Jadi, kuncinya adalah pemanfaatan yang dimana ketika

masyarakat memanfaatkan perpustakaan desa itu dengan baik itu sudah cukup bagus dan dapat dikatakan pembangunan perpustakaan desa ini berjalan dengan optimal.

Di dalam struktur Pemerintah, masyarakat menjadi komponen paling bawah karena Pemerintah berperan memegang kendali dalam urusan aparatur Pemerintahan, sedangkan peran masyarakat menjalankan keputusan dan aturan yang dibuat oleh Pemerintah. Maksud dari peran sebagai terapi dalam hal ini terapi yang dimaksud adalah bagaimana Peran dari Pemerintah sendiri dapat meningkatkan rasa percaya diri masyarakatnya, rasa aman dan meningkatkan kepercayaan kepada aparatur Pemerintah itu sendiri. Pemerintah mempunyai peran motivator sebagai pendorong rasa percaya diri setiap warganya. Peran Pemerintah adalah memperbaiki pola pikir masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakatnya karena dengan adanya kemajuan dalam pola pikir maka kepercayaan diri yang tinggi dari masyarakatnya akan membantu dan mendukung perubahan yang baik.

Selama ini Pemerintah belum terlalu efektif mendukung adanya usaha-usaha pemberdayaan atau kegiatan yang ada di kota-kota kecil khususnya di pedesaan sehingga menyebabkan masyarakatnya belum cukup mempunyai keberanian yang tinggi dan partisipasi yang besar. Maka dari itu Pemerintah lebih baiknya mendukung segala usaha yang dilakukan pada masyarakat di pedesaan dan memberikan apresiasi kepada usaha tersebut agar masyarakat

merasa termotivasi dan mengembangkan segala usaha dan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan, seperti halnya upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui Perpustakaan Desa.

Komunikasi antar tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, lembaga-lembaga masyarakat desa, tentang kondisi masyarakat desa serta antar segenap komponen masyarakat desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Wukirsari seperti kegiatan musdus dan musrenbang memiliki tujuan yang sama yaitu demi memajukan Desa Wukirsari menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur untuk kedepannya. Dengan adanya perpustakaan desa ini juga berhasil mengangkat prestasi yang lain dari Desa Wukirsari sendiri, pemerintah juga selalu mensosialisasikan kepada masyarakat agar Perpustakaan ini harus selalu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar demi mendekatkan buku dan minat baca masyarakat Desa sedangkan masyarakat juga mendukung dan turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di Perpustakaan.

Upaya Pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan Pustaka Desa dalam menumbuhkan minat baca masyarakat tidak main-main Pustaka Desa Wukirsari saat ini memiliki koleksi buku lebih dari 5000 eksemplar koleksi buku tercetak yang dimiliki oleh Pustaka Desa.

**Tabel 3.4**

**Jumlah Koleksi Buku Tercetak Pustaka Desa**

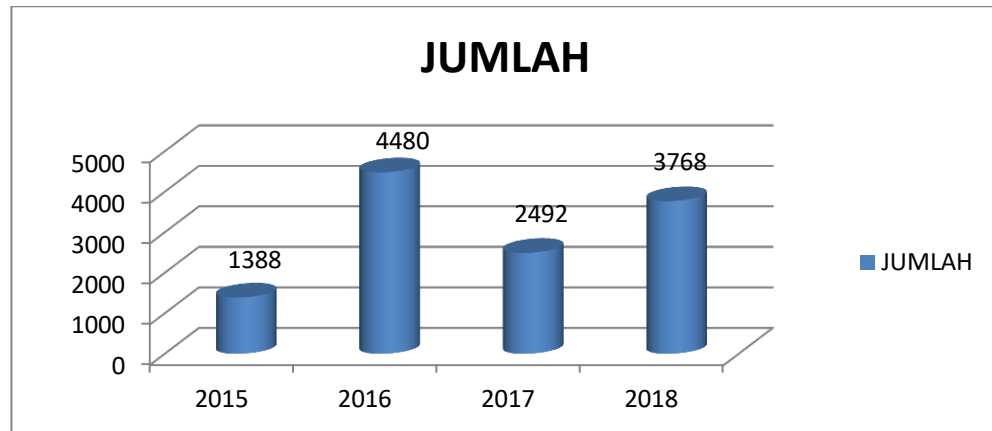
Tahun	Judul	Eksemplar
2012	2.135	2.252
2013	2.432	2.571
2014	2.983	3.034
2015	3.332	3.578
2016	3.956	4.101
2017	4.421	4.735
2018	5.128	5.565

*Sumber : Pustaka Desa Wukirsari, 2018*

Total Jumlah kunjungan Tahun 2018 adalah 3768 orang. dengan wilayah tersebar di wukirsari khususnya dan desa sekitar pustaka desa. Rata-rata setiap hari menerima kunjungan  $\pm 41$  orang/hari. Berikut grafik pengunjung Rata-rata per bulan di Pustaka Desa Wukirsari dari tahun 2012 sampai tahun 2018 yang diperoleh oleh penulis :

**Grafik 3.1**

**Grafik perkembangan jumlah pengunjung pertahun**



*Sumber : Pustaka Desa Wukirsari, 2018*

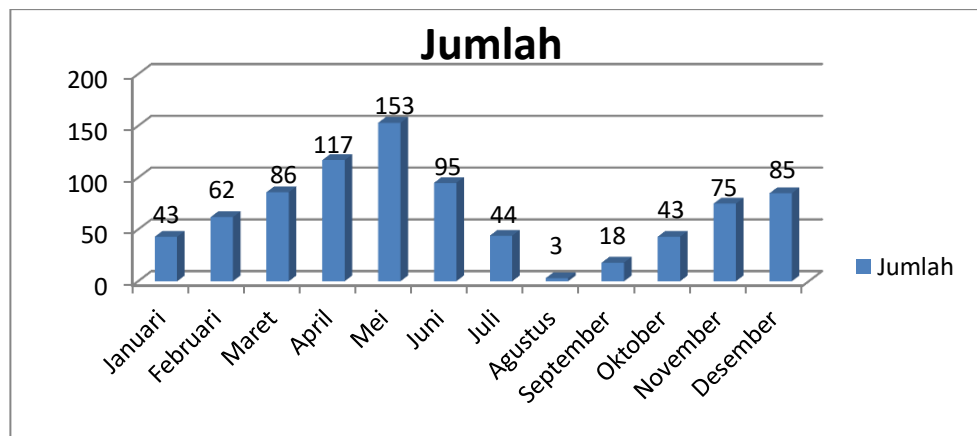
Dari grafik di atas terlihat jumlah pengunjung di Pustaka Wukirsari dari Tahun 2016 mendapat jumlah yang paling tinggi yaitu 4.480 pengunjung dan jumlah pengunjung paling rendah pada Tahun 2015 yaitu 1.388 pengunjung. Tetapi pada tahun 2017 dan 2018 jumlah pengunjung meningkat signifikan tetapi masih normal. Kenaikan jumlah pengunjung yang tinggi pada Tahun 2016 disebabkan karena pada tahun tersebut Pustaka Desa Wukirsari mempunyai banyak program kegiatan dan banyak fasilitas baru di Pustaka Desa Wukirsari sehingga hal tersebut membuat masyarakat menarik untuk datang di Pustaka Desa. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah namun tidak terlalu signifikan akhirnya pada Tahun 2018 jumlah pengunjung kembali naik dengan sendirinya hal tersebut disebabkan Pustaka Desa menambahkan ribuan koleksi buku yang khususnya buku untuk anak-

anak karena kriteria Pengunjung Pustaka Desa paling banyak adalah anak-anak dan remaja.

Selanjutnya penulis akan menjabarkan jumlah peminjaman buku yang dilakukan pengunjung Pustaka Desa selama Tahun 2018, data dibawah ini penulis peroleh dari data laporan tahunan Pustaka Desa Wukirsari berikut grafik yang sudah penulis buat :

**Grafik 3.2**

**Grafik Pengunjung Tahun 2018**



**Sumber : Pustaka Desa Wukirsari, 2019**

Dari hasil grafik di atas jumlah peminjaman buku oleh pengunjung Pustaka Desa tidak sebanyak jumlah pengunjung yang datang perharinya, hal ini bukan menjadi masalah utama bagi pustaka sebab hasil pengamatan langsung oleh penulis dan wawancara dengan pengurus Pustaka Desa ialah pengunjung Pustaka Desa lebih suka membaca buku ditempat karena dalam peraturan Pustaka Desa peminjaman buku yang dibawa pulang maksimal

hanya 2 sedangkan jika pengunjung membaca di tempat mereka bisa membaca buku apa saja yang mereka inginkan dan pengunjung bisa datang di hari selanjutnya.

Dari hasil grafik dan gambar diatas yang berisi data jumlah koleksi buku, jumlah pengunjung yang datang, dan jumlah peminjaman setiap bulannya terlihat Pustaka Desa selalu memberikan hasil laporan administrasi kepada Pemerintah dan publik, hal ini bertujuan agar Pemerintah juga selalu melakukan evaluasi dari kurangnya Pustaka Desa. selain itu, masyarakat Desa Wukirsari juga sadar tentang manfaat adanya perpustakaan desa yang mereka miliki dan perpustakaan Desa Wukirsari tidak hanya di akses oleh masyarakat Desa Wukirsari saja tetapi masyarakat sekitar juga dapat menggunakannya. Bentuk dukungan masyarakat Desa Wukirsari tidak hanya menjadi pengunjung di Pustaka Desa saja tetapi mereka juga berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan yang ada di Pustaka Desa.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah satu warga Desa Wukirsari Nutria Wijayanti seperti yang dikutip dibawah ini, sebagai berikut:

*“sangat mendukung, karena generasi terutama anak kecil sekarang yang saat ini terkikis arus globalisasi ini bisa mendekatkan mereka kembali dengan buku, masyarakat sendiri juga ada yang aktif terjun ke perpustakaan tersebut jadi ya nggak sepenuhnya pasif tetapi beberapa ada yang aktif ikut andil.”*

Selain partisipasi aktif masyarakatnya, menyangkut tentang pandangan masyarakat soal bentuk transparansi pemerintah Desa Wukirsari



dalam segala kebijakan Program desa terutama perpustakaan ini menurut pendapat lain dari Nutria Wijyantio sebagai berikut:

*“transparansi sebetulnya sudah ada, dari pemerintah juga sangat dengan adanya perpustakaan itu benar-benar diakui dan menjadi salah satu kebanggaan dari pemerintah desa, keuntungan yang didapat dengan adanya perpustakaan ini budaya masyarakat desa wukirsari semakin tinggi.”*

Di setiap pembangunan desa nilai sebuah keunggulan pasti selalu memiliki celah dan kekurangan disetiap programnya, sejauh mana keunggulan yang dimiliki Perpustakaan Desa juga memiliki persoalan ataupun hambatan. Perpustakaan Desa Wukirsari berlomba melawan arus globalisasi sangat tidak mudah buku melawan alat komunikasi yang tentunya lebih mudah, masyarakat juga semakin jauh dari membaca. Kelemahan di Perpustakaan Desa saat ini terletak pada sumber daya manusianya sendiri, yang kedua tenaga perpustakaan dan koordinasi antar struktur perpustakaan yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Desa.

Dalam meningkatkan kepercayaan dan pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca melalui Perpustakaan Desa maka Pemerintah Desa Wukirsari mempunyai upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi rutin dengan Pengurus Perpustakaan Desa
- 2) Pemerintah Desa melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, BPAD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, forum masyarakat desa dan stake holders lainnya

- 3) Bekerjasama dengan tokoh-tokoh seperti seniman, pendongeng, penulis, komunitas membaca dan juga pelibatan Karang Taruna dalam membuat acara-acara kreatif di Pustaka Desa
- 4) Memberikan penghargaan bagi pengelola perpustakaan yang memiliki dedikasi yang baik dan loyalitas yang tinggi dalam membantu pengembangan Pustaka Desa
- 5) Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang rajin datang berkunjung untuk membaca dan meminjam buku di perpustakaan
- 6) Melakukan promosi melalui *door to door*, acara kemasyarakatan dan pemanfaatan sosial media
- 7) Membangun kemitraan antara pemerintah pusat, peran swasta dan tokoh-tokoh penting lainnya yang berkaitan dengan Perpustakaan Desa.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Wukirsari tidak hanya berbentuk pengelolaan Pustaka Desa dalam pembangunan infrastruktur, tetapi yang utama adalah perlunya kegiatan-kegiatan atau program kreatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memakai fasilitas Perpustades, dan Pengurus Pustaka Desa melakukan transformasi fungsi dengan kegiatan penyelarasan antara membaca buku dengan menerapkan hasil dari kegiatan pemberdayaan.

Upaya menggiatkan literasi tidak hanya dilakukan oleh Peran Pemerintah dan pengurus perpustakaan. Masyarakat sudah seharusnya juga

turut aktif dalam kontribusi mengenalkan buku kepada masyarakat melalui Perpustakaan Desa. Panggiatan gerakan literasi di Indonesia memang masih menjadi tantangan, terutama akses terhadap informasi itu sendiri. Di era digital seperti sekarang semua orang dapat memproduksi informasinya sendiri, maka kampanye literasi semakin sulit dilakukan. Maka dari itu Pemerintah dan Pengurus Perpustakaan Desa harus mampu bersaing dalam membudiyakan minat baca khususnya kepada generasi digital.

Kondisi lingkungan Desa yang kondusif dan dibangun atas semangat kebersamaan menjadi syarat penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa itu sendiri lebih diarahkan pada upaya memberdayakan masyarakat desa, sehingga masyarakat merasa bahwa program perpustakaan desa ini juga ditujukan untuk memajukan taraf hidup dan kemajuan wilayah desa Wukirsari dan sekitarnya dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat maka akan munculah persamaan persepsi pada diri masyarakat di Desa Wukirsari yang akan menumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakatnya dalam mendukung pembangunan desa melalui perpustakaan desa untuk meningkatkan dan menumbuhkan minat baca di masyarakat desa.